

☐ Nama : Tegar Bagus Dermawan

☐ NPM : 2152011065

☐ Sumber YouTube "Syahrul Mustofa"

☒ 1. Analisa hukum tentang bagaimana data

☐ Ikat HI terhadap hukum yang berlaku

☐ di negara² dan Indonesia pada khususnya,
☐ dengan menggunakan contoh kasus!

☐ → Kasus Mobil nasional

☐ Indonesia secara resmi bergabung dengan

☐ World Trade Organization (WTO), dengan

☐ Indonesia meratifikasi Konvensi WTO

☐ melalui "UU no 7 tahun 1994" maka secara

☐ hukum terikat ketentuan² yang ada dalam

☐ "General agreement on tariffs and trade".

☐ Nah Kasus ini diawali dengan

☐ dikeluarkannya Instruksi Presiden no 2

☐ tahun 1996 mengenai Program mobil

☐ nasional sebagai trobosan di sektor

☐ otomotif Indonesia. Pada dasarnya

☐ bertujuan tercapainya kemajuan bangsa

☐ Indonesia dalam industri otomotif.

☐ Program mobil nasional ini yang

☐ menyuju "Pt. Timor Putra Nusantara"

Sebagai perusahaan yang memproduksi mobil nasional. Namun pada kenyataannya PT TPN belum dapat memproduksi mobil di dalam negeri, maka dikeluarkanlah Kepres no 92 th 1996 yang mengizinkan bahwa PT TPN mengimpor mobil nasional yang kemudian diberi merek timur yang seakan-akan buatan Indonesia baik dalam bentuk jadi / hanya CBUNTA saja dari Korea Selatan dan perusahaan tersebut juga diberikan hak istimewa yaitu bebas pajak barang mewah dan bebas masuk biaya barang impor.

Hak inilah yang kemudian mendatangkan reaksi dari beberapa pihak terutama adalah Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Jepang kemudian berutaha keras karena mempunyai kepentingan kuat dalam industri otomotif. Akhirnya tersadilah dialog antara Jepang dan Pemerintah Indonesia namun dalam dialog ini ternyata menemui jalan buntu. Kemudian Jepang melalui wakil menteri

☐ Perdagangan internasional dan industri
☐ membawa masalah ini ke WTO.

☐ Jepang menilai bahwa kebijakan
☐ Pemerintah tersebut sebagai wujud diskriminasi
☐ diskriminasi dan oleh karena itu melanggar

☐ Prinsip 2 Perdagangan bebas. Dalam
☐ Penjelasan Kasus mobil nasional tersebut

☐ WTO memutuskan bahwa Indonesia
☐ telah melanggar Prinsip 2^a grade yaitu
☐ national treatment dalam menilai

☐ Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan
☐ Spirit Perdagangan bebas.

☐ Oleh karena itu WTO menjatuhkan
☐ Putusan kepada Indonesia untuk
☐ menghilangkan Subsidy serta segala kemudahan
☐ yg diberikan kepada PT TPN selaku
☐ produsen mobil timur. Keputusan ini
☐ menunjukkan bahwa Hukum Nasional
☐ tunduk pada hukum internasional.